

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
Volume 2, Nomor 4, May 2024, Halaman 438-443  
Licenced by CC BY-SA 4.0  
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11220937)  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11220937>

## Analisis Implementasi Nilai Karakter Peduli Terhadap Penerapan Program SDGs Nomor 2

Rif'at NurAesy Alifah<sup>1</sup>, Trimurtini<sup>2\*</sup>

<sup>12</sup>PPG Prajabatan Gelombang 1 Tahun 2024, Universitas Negeri Semarang  
Email Korespondensi: [trimurtinipgsd@mail.unnes.ac.id](mailto:trimurtinipgsd@mail.unnes.ac.id)

### Abstrak

Pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi dalam Keterlibatan Global dengan PBB di bawah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 59. Seiring dengan fokus pemerintah Indonesia pada implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, negara ini juga menerima bonus demografi dengan perkiraan produktivitas sebesar 67%, yang memiliki potensi besar untuk memajukan negara sebagai pelaksana kepentingan nasional. Pada saat yang sama, bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan ancaman perlawanan nasional yang bersumber dari kondisi sosial politik dan perekonomian pada tingkat global, regional, dan nasional. Artikel ini mengkaji posisi SDGs dalam agenda global, kepentingan nasional Indonesia dalam SDGs, dan dampaknya terhadap keberlanjutan nasional. Dalam tulisan ini penulis fokus pada pencapaian SDGs Nomor 2 Dengan cara ini, asuransi kesehatan umum harus diambil. SDGs didasarkan pada gagasan bahwa lingkungan dan keadilan sosial. Harus dijelaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan dan sektor harus berkontribusi untuk mencapai tujuan SDG. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan pertimbangan memperkenalkan program asuransi sosial untuk menjamin hak kesehatan masyarakat miskin dan kurang beruntung.

**Kata kunci:** Nilai Karakter, Peduli, SDGs

### Abstract

*In 2017, the Indonesian Government committed to participate in Global Engagement with the United Nations under the Sustainable Development Goals (SDG) through Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 59. Along with the Indonesian government's focus on implementing the Sustainable Development Goals, the country is also receiving a demographic bonus with an estimated productivity of 67%, which has great potential to advance the country as an implementer of national interests. At the same time, the Indonesian nation faces challenges and threats of national resistance originating from socio-political and economic conditions at the global, regional and national levels. This article examines the position of the SDGs on the global agenda, Indonesia's national interests in the SDGs, and their impact on national sustainability. In this article the author focuses on achieving SDGs Number 2. In this way, general health insurance must be taken. The SDGs are based on the idea that environmental and social justice. It must be made clear that all stakeholders and sectors must contribute to achieving the SDG goals. The government aims to improve the quality of health services by achieving sustainable progress, economic growth must be in line with the consideration of introducing social insurance programs to guarantee the health rights of the poor and disadvantaged.*

**Keywords:** Character Values, Caring, SDGs

---

### Article Info

Received date: 30 April 2024

Revised date: 9 May 2024

Accepted date: 17 May 2024

## PENDAHULUAN

Upaya percepatan perbaikan gizi merupakan upaya global, tidak hanya bagi Indonesia, namun bagi seluruh negara yang mengalami gizi buruk. Inisiatif ini diluncurkan oleh Majelis Kesehatan Dunia. Upaya penurunan prevalensi stunting antara lain menurunkan prevalensi stunting, menurunkan berat badan, mencegah obesitas pada anak dibawah 5 tahun, dan menurunkan prevalensi anemia pada usia subur (BBLR). Sebagai Negara Anggota PBB dengan tingkat pengasuhan anak yang tinggi, kami berkomitmen untuk mendukung upaya peningkatan gizi lokal melalui Scaling Up Nutrition (SUN), dan peningkatan pemberian ASI eksklusif tidak dapat dipisahkan dari upaya jangka panjang. Membuat rencana jangka pendek, menengah dan pendek berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif (Ni Ketut Aryastami, 2017)).

Pemerintah telah berupaya mengatasi masalah penurunan tersebut melalui berbagai kebijakan dan peraturan serta berbagai cara. Rencana aksi gizi dan gizi nasional 2011-2015 yang disusun Bapenas pada tahun 2011 memuat indikator program dan kegiatan, indikator, target tahunan dan sumber posisi anggaran dari berbagai sektor yang terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi, yaitu: gizi dan gizi pada tingkat nasional. tingkat tingkat Rencana aksi ini merupakan pedoman pelaksanaan gizi dan pembangunan di tingkat pusat, negara bagian, kabupaten dan kota bagi instansi pemerintah serta masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan gizi dan perbaikan gizi dan disusun sebagai pedoman. Departemen yang terlibat dalam implementasi rencana aksi ini adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bapenas dan Badan POM (Latifa, 2018a).

Indonesia terus mengalami ledakan penduduk, dan salah satu penyebab ledakan penduduk tersebut adalah pernikahan dini. Tingginya jumlah perempuan yang menikah muda disebabkan karena hubungan seks yang terlalu dini. 8% wanita usia 25-49 tahun melakukan hubungan seksual pertama kali pada usia 15 tahun dan 45% pada usia 20 tahun. Selain itu, lingkungan tempat tinggal mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku anak. Perempuan yang tidak bersekolah lebih aktif secara seksual dibandingkan perempuan yang berpendidikan tinggi, hanya 5-6% perempuan yang tidak bersekolah dasar tidak pernah melakukan hubungan seks. Lebih dari 24% wanita yang tidak lulus SMA atau perguruan tinggi dan belum pernah berhubungan seks atau lebih (B.A. Pratiwi, Angraini, Padila, Nopiawati, & Yandrizal, 2019b).

Pernikahan dini justru menyebabkan stunting karena semakin muda seorang perempuan menikah, maka semakin besar pula risiko anaknya mengalami stunting karena belum siap memiliki anak. Perempuan harus dididik agar tidak menikah dini, tapi utamakan pendidikannya. Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin sedikit informasi yang mereka miliki tentang bagaimana memberi makan anak di masa depan, sehingga kemungkinan besar anak tersebut akan mengalami kondisi yang lebih buruk. Akibat dari perkawinan di bawah umur tidak hanya berdampak pada diri sendiri, namun juga berdampak pada semua orang, lingkungan dan keluarga. Dari sudut pandang medis, pernikahan muda sangat berisiko karena mudah mengalami pendarahan, anemia dan komplikasi saat melahirkan (Yulius, Abidin, & Liliandriani, 2020).

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperlambat. Dulu, kebijakan kesehatan Indonesia juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Meski demikian, persoalan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah rendahnya angka pemberian ASI eksklusif yang belum mencapai 50 persen. Selain itu, anak di atas 6 bulan biasanya mengonsumsi hingga 95% karbohidrat, jauh lebih sedikit dibandingkan protein, buah-buahan, dan sayur-sayuran, sehingga mengakibatkan asupan nutrisi tersebut tidak mencukupi. Selain itu, buruknya pemantauan konsumsi susu dan kurangnya kesempatan menyusui juga menjadi masalah (Ulfah dan Nugroho, 2020).

Gizi optimal untuk mencegah stunting dapat dicapai melalui gerakan nasional percepatan perbaikan gizi seiring komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif yang sangat berharga. Itu milik bangsa dan negara Indonesia. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan status gizi yang optimal melalui perbaikan gizi secara berkelanjutan (Pawestuti, Sumanto dan Astuti, 2021).

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengurangi permasalahan pemberian makan pada bayi dan anak dengan hanya memberikan ASI kepada anak dengan suplemen mikronutrien atau makanan yang diperkaya vitamin dan mineral, serta penyuluhan gizi kepada orang tua khususnya ibu. kebijakan termasuk program terpadu sektor kesehatan (Olo, Mediani dan Rakhmawati, 2020)

Kebijakan lain yang mendukung promosi perawatan preventif di Indonesia, misalnya. 18 Tahun 2012 yang dilanjutkan dengan Gerakan Percepatan Pembangunan Gizi Nasional pada periode presiden tahun 2013 dengan Keputusan Presiden No. 42 dan Keputusan Presiden No. 83 Tahun 2017. Selain itu, ada pula Pedoman Presiden Masyarakat Hidup Sehat Nomor 1 Tahun 2017 bahkan kebijakan Menteri Desa dan Peraturan PDT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Yayasan Desa. , salah satunya digunakan dalam pencegahan. Kebijakan-kebijakan Indonesia saat ini, khususnya di tingkat administrasi publik, sebagian besar ditujukan untuk mencegah perlambatan ini. Ditambah kebijakan di masing-masing pemerintah daerah (Ulfah dan Nugroho, 2020).

Upaya mengurangi pengereman dengan target 14 persen pada tahun 2024 memerlukan peran serta berbagai sektor, baik negara maupun swasta, serta seluruh lapisan masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat, salah satunya kelompok penggerak PKK dan kader kesehatan masyarakat berupaya mencegah perlambatan tersebut. Oleh karena itu, perlu melibatkan PKK dan tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan dan deteksi stunting dengan meningkatkan pengetahuan tentang stunting pada anak kecil dan upaya pencegahannya (Yuwanti et al., 2022).

Tujuan pembangunan berkelanjutan didasarkan pada gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu lingkungan dan keadilan sosial untuk mencapai keberlanjutan. Perlu dipahami bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, semua pihak dan semua sektor harus berpartisipasi. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan melaksanakan program asuransi sosial yang bertujuan untuk menjamin hak kesehatan masyarakat miskin atau kurang beruntung. Dikembangkan di Indonesia, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 Tahun 2004 merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dilaksanakan melalui Sistem Jaminan Sosial. dengan partisipasi wajib (mandatory) (Nurhalimah Sitorus, 2024).

## **METODE**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi pustaka. Metode studi pustaka merupakan suatu pengumpulan data dengan langkah mencari sumber dan merangkainya dari berbagai sumber seperti artikel ilmiah maupun buku yang sudah ada (Adlini, dkk. 2021: 974). Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kepustakaan ini adalah dengan menelusuri berbagai data tentang suatu variabel baik berupa buku, makalah atau artikel ilmiah dan lain sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah dengan metode analisis isi. Hermawan, dkk (2019:66) dalam penelitiannya menerangkan bahwa metode analisis ini digunakan untuk memelihara keberkelangungan proses penilaian serta untuk mencegah terjadinya misinformasi (kesalahpahaman manusia yang mungkin terjadi karena minimnya pengetahuan atau peneliti). Maka dilakukannya pengecekan antar pustaka dan membaca lalu memilah ulang pustaka. Laporan pada pelaksanaan penelitian ini disusun dengan mengutamakan prinsip kesederhanaan dan kemudahan.

## **Hasil DAN PEMBAHASAN**

Pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi dalam Keterlibatan Global dengan PBB di bawah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 59. Seiring dengan fokus pemerintah Indonesia pada implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, negara ini juga menerima bonus demografi dengan perkiraan produktivitas sebesar 67%, yang memiliki potensi besar untuk memajukan negara sebagai pelaksana kepentingan nasional. Pada saat yang sama, bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan ancaman perlawanan nasional yang bersumber dari kondisi sosial politik dan perekonomian pada tingkat global, regional, dan nasional. Artikel ini mengkaji posisi SDGs dalam agenda global, kepentingan nasional Indonesia dalam SDGs, dan dampaknya terhadap keberlanjutan nasional (Irhamisyah, 2019).

Program SDG sebenarnya merupakan perpanjangan dari program Millennium Development Goals atau sering disingkat menjadi Millennium Development Goals. Jika sebelumnya hanya ada 8 tujuan dalam program Pembangunan Berkelanjutan yang harus dipenuhi, kini setelah diterapkannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tujuan tersebut berubah menjadi 17. Tujuan utama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah untuk melindungi kelangsungan hidup masyarakat. planet Bumi itu sendiri, menghilangkan kemiskinan, meminimalkan kesenjangan dan. Secara umum konsep yang diharapkan dalam SDGs diperlukan untuk menciptakan pembangunan yang mendukung perubahan-perubahan yang terjadi pada MDGs sebelumnya. Jika dicermati, perubahan situasi dunia mulai berubah drastis sejak abad ke-21. Tujuan pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana dan mencapai hasil maksimal sesuai tujuan yang ada, apabila pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil selaras. Tujuan dari tujuan pembangunan berkelanjutan juga untuk mendorong pandangan berbagai pihak mengenai faktor ekonomi, sosial dan lingkungan yang mempengaruhi kehidupan. Salah satu SDG mengenai isu kesehatan tercantum pada tujuan ketiga. Tujuan ini menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan di semua kelompok umur. Di negara-negara berkembang di dunia, permasalahan kesehatan masih banyak dijumpai bahkan dianggap sebagai permasalahan yang serius.

Masalah kesehatan tentu saja menjadi kekhawatiran besar bagi setiap orang. Oleh karena itu, adanya tujuan keberlanjutan secara tidak langsung mengharuskan negara untuk memberikan perhatian yang besar terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Semua negara harus mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, energi, air, pekerjaan, karena setiap orang berhak atas jiwa dan raga, rasa aman dan lingkungan yang bersih. Dengan demikian, masyarakat yang sehat dapat tercipta di masa depan (Arum Febriliana Pratiwi, 2024)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau sering disingkat SDG, merupakan program global dengan 17 tujuan yang harus dilaksanakan secara komprehensif di semua negara. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dianggap sebagai suatu sistem yang saling berhubungan, sehingga semua tujuan secara tidak langsung saling mempengaruhi. Tujuan pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai tujuan pembangunan untuk pembangunan dan promosi yang lebih baik bagi semua negara. Kemajuan pembangunan suatu negara memberikan dampak timbal balik terhadap negara lain, oleh karena itu pelaksanaan program SDG harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab (Arum Febriliana Pratiwi, 2024).

Sejak diluncurkan pada tahun 2000, PBB meluncurkan program MDG untuk periode tahun 2000 hingga 2015. Pada tahun 2016 hingga 2030, PBB memulai kembali program SDG. Sebagai anggota PBB, Indonesia dan 192 negara lainnya berpartisipasi dalam implementasi SDGs sebagai agenda pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia berkomitmen menyukseskan implementasi SDGs melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. (Irhamyiah, 2019).

Penjelasan SDGs nomer 2 yaitu tentang menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Ketahanan pangan suatu negara berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Karena mengonsumsi makanan yang kualitasnya buruk akan mempengaruhi gizi anak. Khususnya pada anak usia dini, stunting dapat terjadi, dan stunting tidak hanya berdampak pada tinggi badan anak, namun juga secara mental, emosional, dan kognitif. Sehingga dapat mempengaruhi kondisi fisik penerus bangsa Indonesia di kemudian hari (Irhamyiah, 2019).

Ketika menggalakkan program SDG bidang kesehatan, sebelumnya MDG bidang kesehatan hanya mempunyai 4 tujuan, 8 sasaran dan 31 indikator, namun kini SDGs mempunyai 4 tujuan, 19 sasaran dan 31 indikator. Kesehatan merupakan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan dari risiko keuangan, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan akses bagi semua orang terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman, efisiensi dan kualitas. Dengan cara ini, asuransi kesehatan umum harus diambil. SDGs didasarkan pada gagasan bahwa untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan pertimbangan lingkungan dan keadilan sosial. Harus dijelaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan dan sektor harus berkontribusi untuk mencapai tujuan SDG. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan memperkenalkan program asuransi sosial untuk menjamin hak kesehatan masyarakat miskin dan kurang beruntung. (Nurhalimah Sitorus, 2024). Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebagai acuan bagi desa dalam menyusun kegiatan dan anggaran tahunannya. Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat sesuai dengan kewajiban hukum diprioritaskan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Prioritas pembangunan desa kini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Mahin, 2024). Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan global yang diterapkan pada pembangunan negara dan wilayah. Oleh karena itu, pemerintah daerah mempunyai tugas untuk berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini tergantung pada pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya dan kekuatan untuk melakukan inovasi dalam bentuk pelayanan publik dan kebijakan lainnya. (Mahin, 2024).

Program konservasi Universitas Negeri Semarang telah berjalan sejak dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Prof. Muhammad Nuh pada tanggal 12 Maret 2010. Konservasi tersebut diwujudkan melalui visi Unnes yang artinya "Universitas Konservasi" adalah perguruan tinggi yang melaksanakan Tri Dharma Unnes. pendidikan tinggi berdasarkan prinsip konservasi, meliputi upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya alam, etika, seni, seni, dan budaya. Konsep konservasi Universitas Negeri Semarang merupakan salah satu landasan yang diperlukan untuk membentuk kebiasaan dan ketahanan. Konsep konservasi sebagai landasan atau landasan

pendidikan karakter di Universitas Negeri Semarang tidak hanya konteks fisiknya saja, namun juga nilai tuntunan yang membantu warga Universitas Negeri Semarang untuk lebih menyelamatkan dan melestarikan komunitasnya. Degradasi lahan juga menyebabkan penganutnya semakin meninggalkan budaya (termasuk nilai-nilai moral dan sosial). (Saddam, 2016).

Nilai karakter konservasi Universitas Negeri Semarang memiliki jumlah 8 karakter, yaitu terdapat inspiratif, humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, jujur, dan adil. Di dalam analisis ini saya mengambil nilai karakter peduli untuk dihubungkan dengan program SDGs nomor 2 yaitu tentang menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik. Peduli adalah kemampuan untuk menunjukkan pengertian kepada orang lain dengan memperlakukan mereka dengan penuh perhatian dan toleransi (Kholifatul Wakhidah, 2014).

Korelasi yang dapat dianalisis untuk kedua variabel ini bergantung pada bagaimana pemerintah memandang Program SDGs Nomor 2. Di sini kita akan mengambil contoh spesifik anak stunting. Dampak stunting pada anak mempunyai dampak yang cukup besar terhadap aspek tumbuh kembang anak. Ketika berbagai aspek tumbuh kembang anak terganggu maka akan berdampak pada masa depan dunia pendidikan.

Upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah gizi pada bayi dan anak kecil mencakup pemberian ASI eksklusif untuk zat gizi mikro dan memberi mereka makanan yang diperkaya vitamin dan mineral. Hal ini juga termasuk memberikan nasihat kepada orang tua, khususnya ibu, mengenai praktik gizi melalui program yang bermanfaat bagi anak diintegrasikan ke dalam praktik nutrisi kesehatan (Annita Olo, 2021).

Langkah-langkah lain untuk mempercepat pencegahan stunting di Indonesia antara lain adalah UU Pangan No.18 Tahun 2012, Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013, dan Peraturan Presiden No.83 Tahun 2017 tentang Gerakan Gizi Nasional telah diluncurkan untuk mempercepat perbaikan. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Hidup Sehat Masyarakat, Instruksi Menteri Desa, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Dana Desa yang salah satunya: digunakan untuk keperluan dari mencegah stunting. Kebijakan yang ada di Indonesia, khususnya di tingkat pusat, terutama ditujukan untuk pencegahan stunting. Ditambah lagi kebijakan positif ini dari masing-masing pemerintah daerah (Irma Fitriana Ulfah, 2020)

Upaya penurunan stunting sebesar 14% pada tahun 2024 memerlukan partisipasi berbagai sektor publik dan daerah serta seluruh lapisan masyarakat. Upaya pencegahan stunting menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, termasuk tim penggerak PKK dan tenaga kesehatan yang tergabung dalam masyarakat. Atas dasar itu, perlu dilakukan upaya pelibatan PKK dan pelaku kesehatan dalam upaya pencegahan dan deteksi stunting dengan melakukan sosialisasi pengetahuan tentang stunting pada anak dan upaya pencegahannya (Yuwanti, 2022). Upaya serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes untuk mengatasi kejadian stunting yang terjadi di wilayah Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bidan desa di Puskesmas Brebes, jumlah anak stunting di wilayah Kabupaten Brebes sangat banyak. Oleh karena itu, bidan di desa yang anggota posyandu tuna grahitanya harus kompeten dalam menangani kasus tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya bidan desa yang memberikan pendampingan kepada keluarga yang mempunyai anakstunting dan memberikan biskuit bergizi kepada anak stunting.

Begitu pula dengan kolaborasi antara bidan desa dan kader yang berupaya mengatasi kejadian stunting. Petugas yang bertugas turut serta dalam pendataan dan memberikan informasi kepada keluarga yang anaknya menderita stunting. Program pemerintah untuk memberikan makanan sehat kepada anak stunting dilaksanakan dengan baik oleh puskesmas dan kader. Kerja sama ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kasus stunting yang terjadi di Indonesia. Inilah contoh kongkrit program SDGs nomor 2 dan nilai karakter konservasi peduli

## **SIMPULAN**

Korelasi yang dapat dianalisis untuk kedua variabel ini bergantung pada bagaimana pemerintah memandang Program SDGs Nomor 2. Di sini kita akan mengambil contoh spesifik anak stunting. Dampak stunting pada anak mempunyai dampak yang cukup besar terhadap aspek tumbuh kembang anak. Ketika berbagai aspek tumbuh kembang anak terganggu maka akan berdampak pada masa depan dunia pendidikan.

Upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah gizi pada bayi dan anak kecil mencakup pemberian ASI eksklusif untuk zat gizi mikro dan memberi mereka makanan yang diperkaya vitamin dan mineral. Hal ini juga termasuk memberikan nasihat kepada orang tua, khususnya ibu, mengenai praktik gizi melalui program yang bermanfaat bagi anak diintegrasikan ke dalam praktik nutrisi kesehatan. Langkah-langkah lain untuk mempercepat pencegahan stunting di Indonesia antara lain adalah UU Pangan No.18 Tahun 2012, Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013, dan Peraturan Presiden No.83 Tahun 2017 tentang Gerakan Gizi Nasional telah diluncurkan untuk mempercepat perbaikan. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Hidup Sehat Masyarakat, Instruksi Menteri Desa, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Dana Desa yang salah satunya: digunakan untuk keperluan dari mencegah stunting. Kebijakan yang ada di Indonesia, khususnya di tingkat pusat, terutama ditujukan untuk pencegahan stunting. Ditambah lagi kebijakan positif ini dari masing-masing pemerintah daerah.

## REFERENSI

- Annita Olo, H. S. (2021). Hubungan Faktor Air Dan Sanitasi Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Indonesia. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1113-1126.
- Arum Febriliana Pratiwi, N. N. (2024). Pembiasaan Senam Di Sekolah Dasar Dalam Mewujudkan Tujuan Dari Program Sdgs. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 81-85.
- Irhamasyah, F. (2019). Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas Ri*, 45-54.
- Irma Fitriana Ulfah, A. B. (2020). Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan Di Indonesia: Faktor Penyebab Stunting Di Kabupaten Jember. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 201-213.
- Kholifatul Wakhidah, W. A. (2014). Pengaruh Penanaman Nilai-Nilai Konservasi Terhadap Karakter Peduli Pada Lingkungan Anak Usia Dini. *Early Childhood Education Papers ( Belia)*, 38-45.
- Mahin, M. (2024). Penerapan Kebijakan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Fokus*, 224-230.
- Ni Ketut Aryastami, I. T. (2017). Kebijakan Dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 233-240.
- Nurhalimah Sitorus, Y. J. (2024). Peranan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Dalam Mendorong Sdgs Di Indonesia. *Economic Reviews Journal*, 45-60.
- Saddam, D. L. (2016). Integrasi Nilai-Nilai Konservasi Dalam Habitiasi Kampus Untuk Pembentukan Kepribadian Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. *Journal Of Educational Social Studies*, 128-135.
- Yuwanti, L. H. (2022). Pencegahan Stunting Pada 1000 Hpk. *Jurnal Abdimas*, 35-39.